



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 97 TAHUN 2021

### **TENTANG**

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
11. Satuan Organisasi adalah Dinas, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Seksi, UPTD dan Jabatan Fungsional.

12. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas :
    1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
    2. Seksi Perlindungan Perempuan;
  - d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
    1. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
    2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
    1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
    2. Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
    3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. UPTD; dan
  - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas**

**Pasal 4**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak ;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- h. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Paragraf 1  
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c. penyusunan program kerja Dinas;
  - d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
  - e. penyelenggaraan kesekretariatan;
  - f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;

- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Subbagian Program dan Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  - e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
  - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
  - g. pengelolaan keuangan Dinas;
  - h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
  - i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, karsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  - h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
  - i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
  - j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
  - k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
  - l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
  - m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
  - n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
  - o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

##### Paragraf 1

###### Bidang

##### Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - d. penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
  - e. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerjasama dengan instansi/lembaga;
  - f. fasilitasi forum, kelompok kerja dan lembaga layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - g. pengelolaan data dan sistem informasi bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan;
  - i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;
  - c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender;
  - d. pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi terhadap organisasi perempuan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, Lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga nonpemerintah;
  - f. pelaksanaan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
  - g. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender (PPRG) dan pengembangan materi KIE PUG;
  - h. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarustamaan gender;

- i. pembangunan dan penguatan *networking* (jejaring kerja) antar lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga;
- j. pelaksanaan dan pembinaan kesetaraan gender bidang politik, hukum dan hukam, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pembangunan keluarga, bidang infrastruktur dan lingkungan;
- k. pengoordinasian dan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- l. pelaksanaan fasilitasi konselor, pendamping pelatih, tenaga ahli pada lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
- m. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Seksi Perlindungan Perempuan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan data dan pengembangan sistem data gender dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- e. penyiapan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- f. pelaksanaan advokasi kebijakan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
- g. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan perlindungan perempuan;
- i. pelaksanaan pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

##### Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

###### Paragraf 1

###### Bidang

###### Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

###### Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemenuhan Hak anak;
- c. penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- d. pengoordinasian kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- f. penyiapan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan dan kegiatan budaya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus dan pemenuhan Hak anak;
- i. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerjasama dengan instansi/lembaga;
- j. fasilitasi forum, kelompok kerja dan lembaga layanan perlindungan khusus dan pemenuhan Hak anak;
- k. pengelolaan data dan sistem informasi bidang perlindungan dan pemenuhan Hak anak;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Perlindungan Khusus Anak**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perlindungan khusus anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Khusus Anak;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan khusus anak;
  - c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
  - d. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - e. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - g. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait dalam perlindungan khusus anak;
  - h. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi penanganan kekerasan terhadap anak;
  - i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang perlindungan khusus anak;
  - j. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas dan forum terkait perlindungan anak;
  - k. pengelolaan data dan sistem informasi pada Seksi Perlindungan Khusus Anak;
  - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pemenuhan Hak Anak**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak;
  - c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
  - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan teknis terkait hak anak;
  - e. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait hak anak;
  - f. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi hak anak dalam usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - g. pelaksanaan hak partisipasi anak melalui kongres anak dan pengiriman duta anak;
  - h. melaksanakan pelaksanaan puncak Hari Anak Nasional;
  - i. pemberian pendampingan dan fasilitasi pada forum anak;
  - j. perumusan kebijakan berjejaring terkait pemenuhan hak anak pada perlindungan khusus anak;
  - k. penyelenggaraan pembinaan tunas muda pemimpin Indonesia;

1. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang pemenuhan hak anak;
- m. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas dan forum terkait hak anak;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

##### Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

###### Paragraf 1

###### Bidang

###### Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

###### Pasal 25

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. pengordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;

- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- h. pengoordinasian, fasilitasi dan pendampingan kampung KB;
- i. pengoordinasian kegiatan kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Berencana (Forum Genre);
- j. pengoordinasian pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA);
- k. pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang KB lainnya;
- l. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi untuk pelayanan KB bersama fasilitas kesehatan, praktek bidan mandiri;
- o. pelaksanaan, penguatan, pengembangan dan penyediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- p. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program bangga kencana dengan BKKBN;
- q. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan program bangga kencana;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga berencana;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan pengelolaan alat, obat kontrasepsi (alkon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - f. penyelenggaraan pelayanan dan pasca pelayanan KB;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendampingan atau pengayoman kegagalan (jaga mutu) pasca pelayanan KB;
  - h. pelaksanaan promosi konseling kesehatan reproduksi dan hak reproduksi;
  - i. pelaksanaan peningkatan kesertaan KB;
  - j. pelaksanaan peningkatan kompetensi di bidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
  - k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan keluarga berencana;

1. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyusunan kebijakan penanganan stunting;
- m. pengeloaan data dan sistem informasi pada Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat

### Pasal 28

- (1) Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

### Pasal 29

- (1) Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan komunikasi, informasi edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- e. penyediaan dan pendistribusian sarana KIE pengendalian penduduk dan KB;
- f. pelaksanaan promosi dan KIE pengendalian penduduk dan KB;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB dan Kader Institusi Masyarakat;
- h. pelaksanaan penggerakkan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 30

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 31

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian penduduk, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
  - c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan terkait pemetaan, proyeksi perkiraan pengendalian penduduk, pengembangan desain dan komunikasi pengendalian penduduk;
  - g. pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berencana;
  - h. penyusunan profil kependudukan dan keluarga berencana;
  - i. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - j. pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
  - k. pelaksanaan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran hasil produksi usaha kelompok;
  - l. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - m. pengelolaan data indeks pembangunan keluarga;
  - n. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu untuk tribina dan konseling keluarga;
  - o. pelaksanaan tribina keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);

- p. pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Bencana (Forum Genre);
- q. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembangunan keluarga;
- r. pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan keluarga;
- s. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga dalam pembangunan ketahanan keluarga
- t. pengelolaan data dan sistem informasi pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- u. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian penduduk, kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV UPTD

##### Pasal 32

- (1) Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 33

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 34

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 37

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan masing-masing, ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara pada organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan kelembagaan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat penataan kelembagaan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 118) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 27 Oktober 2021

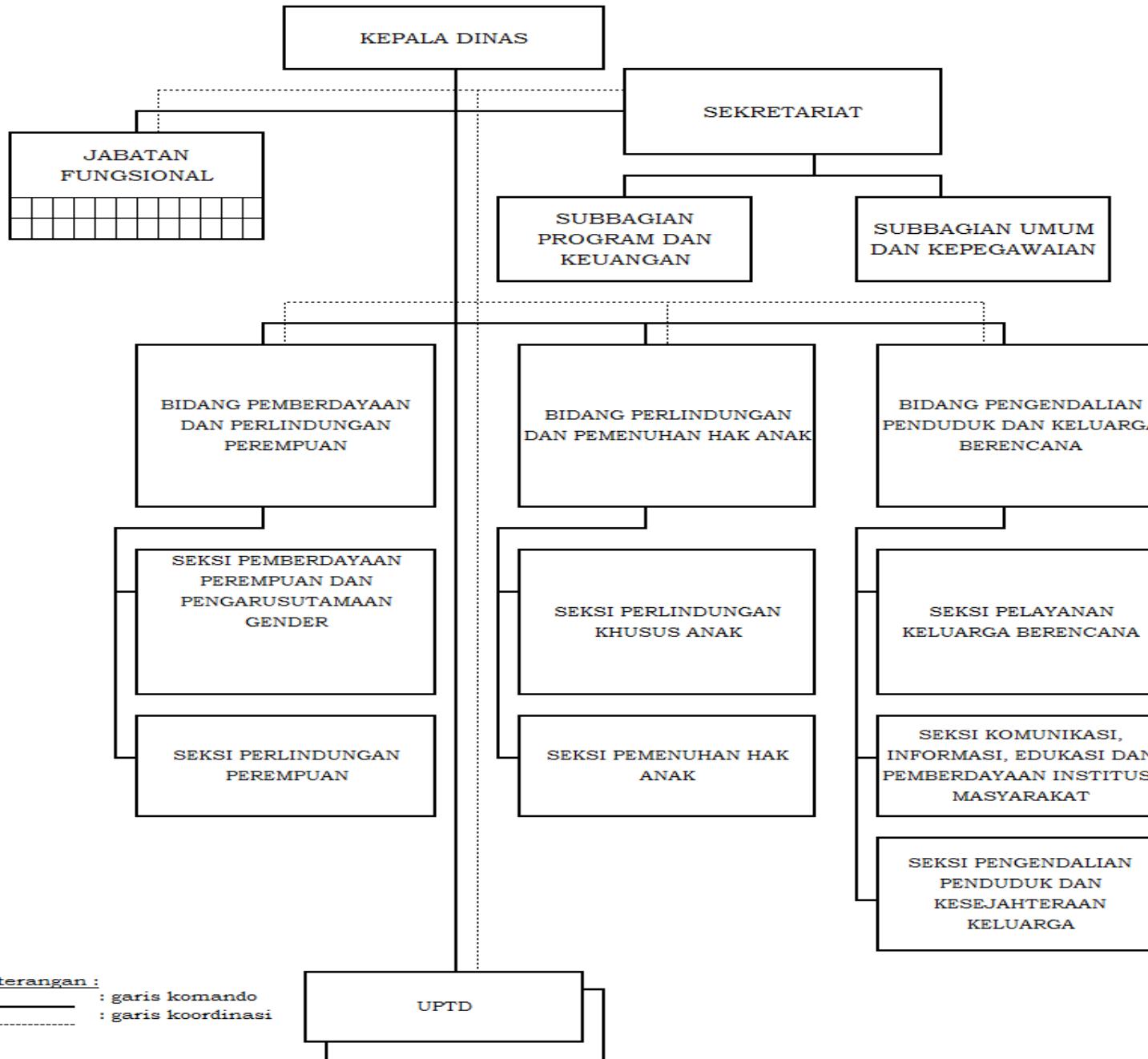
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 97



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
 TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
 ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH